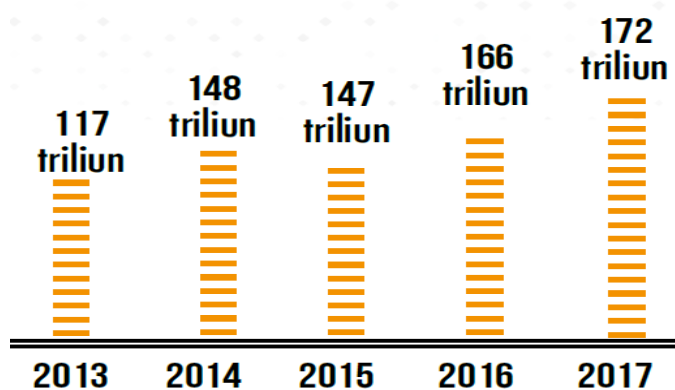


Pengaruh Efektifitas Penyertaan Modal Negara Terhadap Peningkatan Laba BUMN

Tugas dan fungsi penatausahaan Penyertaan Modal oleh pemerintah merupakan konsekuensi kepemilikan modal pemerintah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Berdasarkan RUU APBN 2019, pemerintah menganggarkan Rp17,8 triliun untuk menyuntik modal pada 3 BUMN yaitu PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Hutama Karya, dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero). Dalam perkembangannya, kebijakan pemerintah untuk menyertakan modalnya pada BUMN tidak selalu berbanding lurus dengan kinerja BUMN. Beberapa BUMN malah merugi setelah mendapatkan suntikan dana dari negara.

Grafik Laba BUMN Tahun 2013 – 2017



Berdasarkan Laporan Kinerja Kementerian BUMN tahun 2017, total laba dari seluruh BUMN pada akhir tahun 2017 adalah sebesar Rp172 triliun, meningkat dari posisi akhir tahun 2016 sebesar Rp 166 triliun. Kontribusi peningkatan laba terbesar berasal dari sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, sektor Konstruksi, dan sektor Informasi dan Komunikasi.

Namun, laba yang dihasilkan oleh BUMN pada sektor energi, logistik, kawasan dan pariwisata, masih jauh dari target yang ditetapkan. Tahun 2017 laba BUMN pada sektor tersebut mencapai Rp32,90 Triliun atau hanya 54,0% dari target Perjanjian Kinerja tahun 2017 sebesar Rp60,83 Triliun. PLN menjadi BUMN penyumbang penurunan laba terbesar pada sektor ini.

Meskipun laba BUMN sektor energi tahun sebelumnya tidak tercapai, namun sektor ini masih diandalkan untuk membantu memberi sumbangsih lebih kepada penerimaan negara pada tahun depan, contohnya PT Pertamina dan PT PLN. Kementerian BUMN harus bekerja lebih keras terhadap permintaan setoran dividen pada tahun depan. Pertamina mengalami tekanan performa keuangan karena harga minyak yang menanjak dibandingkan tahun lalu. Sepanjang semester I tahun ini, rata-rata harga minyak mentah Indonesia tercatat di angka US\$48,84 per barel atau naik 35,06 persen dibanding tahun sebelumnya US\$36,16 per barel.

PT PLN juga diperkirakan tidak sanggup untuk menyetor target dividen di tahun depan. Keuangan perusahaan PT PLN tertekan karena meningkatnya harga batu bara dari tahun ini. Kinerja keuangan PLN semakin terbebani dengan menjalankan proyek pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW, khususnya di pembangunan transmisi. Di sisi lain, pemerintah tidak mengubah tarif listrik sejak awal tahun 2018.

Jika dilihat dari segi kapasitas keuangan, BUMN sektor energi masih berkuat dengan manajemen keuangan perusahaan yang tradisional melalui pembiayaan dengan cara melakukan pinjaman ke bank, menjual saham, dan mengeluarkan obligasi, serta pemanfaatan dana internal perusahaan. Dengan tata kelola keuangan seperti ini perusahaan hanya akan berfokus pada cara mengatur hutang perusahaan yang diperoleh.

Padahal, pemerintah juga bisa berperan dalam membuat diversifikasi dalam membantu keuangan BUMN yaitu dengan pengelolaan dividen BUMN. Pemerintah dapat mengonversi dividen menjadi penyertaan modal negara. Sebagai contoh, dividen yang dibagikan 40% dari laba. Pemerintah hanya mengambil 20%, sisanya ditanamkan kembali dalam bentuk PMN. Sehingga kapasitas *leverage* keuangan perusahaan akan bertambah. Tapi pada saat ini ada kendala yang dihadapi oleh BUMN, yaitu adanya target realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari dividen BUMN yang setiap tahun targetnya terus naik. Padahal BUMN memerlukan relaksasi dari pemerintah. Dengan menurunkan target dividen yang disetorkan BUMN kepada negara.

Untuk selanjutnya akan lebih baik jika BUMN tidak terlalu mengandalkan Penyertaan Modal Negara (PMN). Jika membutuhkan tambahan modal (*equity financing*), perusahaan dapat melibatkan investor swasta. Salah satu caranya adalah dengan melibatkan manajer investasi agar mengajak investornya menanamkan modal pada BUMN yang menjalankan proyek infrastruktur. Sasaran dari investor ini adalah pihak yang mengelola dana jangka panjang seperti dana pensiun. Pengelola dana pensiun sebaiknya tidak lagi berpikir membeli bond dan deposito. Tapi mulai menginvestasikan dana yang dikelola kepada sektor riil yaitu infrastruktur.